

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	24
1. Spesifikasi Penelitian	24
2. Metode Pendekatan	25
3. Tahap Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Alat Pengumpulan Data	28
6. Analisis Data	29
7. Lokasi Penelitian	30

8. Jadwal Penelitian	31
----------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH, MUTASI PEGAWAI, DAN *GOOD GOVERNANCE*

A. Pemerintah dan Pemerintahan.....	32
1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan.....	32
2. Tugas dan Fungsi Pemerintah.....	41
3. Kewenangan Pemerintah.....	44
B. Mutasi Pegawai	47
1. Pengertian Pegawai dan Pegawai Negeri.....	47
2. Tugas, Fungsi, dan Peran Pegawai Negeri Sipil	53
3. Pengertian Mutasi	54
4. Tujuan Dan Manfaat Mutasi	56
5. Jenis-Jenis dan Macam-Macam Mutasi	62
6. Pejabat Yang Berwenang Melaksanakan Mutasi Pegawai Negeri .	64
C. Prinsip <i>Good Governance</i>	65
1. Sejarah <i>Good governance</i>	65
2. Pengertian <i>Good Governance</i>	68
3. Prinsip <i>Good Governance</i>	70
4. Ciri-Ciri <i>Good Governance</i>	77

BAB III MEKANISME MUTASI PEGAWAI DI PEMERINTAH

KABUPATEN SUMEDANG

A. Profil Daerah Penelitian	78
1. Sejarah Kabupaten Sumedang	78
2. Lambang Daerah	80
3. Visi dan Misi Kabupaten Sumedang	82
B. Gambaran Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumedang.....	85
1. Pembentukan BKPP	85
2. Visi dan Misi BKPP	87
3. Tujuan BKPP	87
4. Tugas Pokok dan Fungsi BKPP	88
5. Struktur Organisasi BKPP	90
C. Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang.....	91

BAB IV MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

A. Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	95
B. Aspek Hukum Mengenai Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang	104
C. Upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang Untuk Mencegah Mutasi Pegawai Negeri Sipil Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Yang Tidak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	115
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	viii
LAMPIRAN	xvi